

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintahan Daerah (kajian politik dan hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia cet. Ke-7*, Balai Pustaka hlm, Jakarta

Frenadin Adegustara, 2005, *Hukum Administrasi negara*, Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas, Padang, .

Faried Ali, dkk, 2012, *Studi Analisa Kebijakan (Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel teknik Analisa Kebijakan Pemerintahan)*, Aditama, Bandung.

Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Harapan, Jakarta.

Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Universitas Islam Indonesia, Yoghyakarta.

M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke. 2018. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*. Zigie Utam, Bengkulu.

Philipus M. Hadjon, dkk.. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Pres, Yogyakarta.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. PT. Grasindo. Jakarta

B. JURNAL, SKRIPSI, THESIS

Ateng Syafrudin, 2000, "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung. 2000

Bayu Darnias Kurniadi, 2012, "*Desentralisasi Asimetris di Indonesia*", Seminar LAN Jatinangor, Vol. 26, No 1, 2012.

Muhammad Iqbal, 2022, "*Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*", Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, 2002.

Octavianna Evangelista, 2020, "*Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang Rumah Susun Terkait Ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Apartemen Parama Cilandak Jakarta Selatan)*" Jurnal Hukum Adigama, Oktober 2020

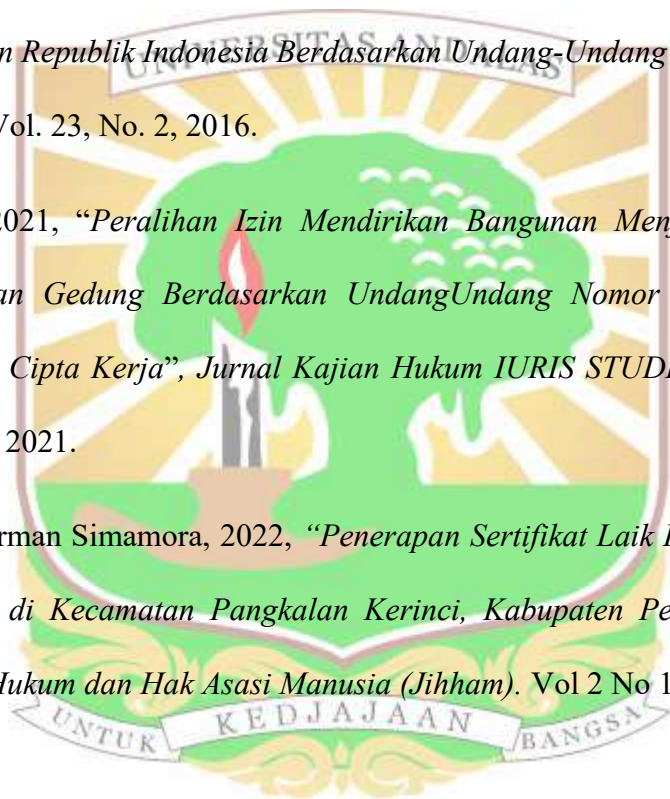
Philipus M. Hadjon, “*Tentang wewenang Pemerintahan (Bestuurbovoegheid)*”, Pro Justitia, Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, No. 1 Tahun XVI, 1998

Rokhim, Abdul, “*Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang, Vol. XIX No. 36.

Septi Nur Wijayanti, 2016, “*Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*”, Vol. 23, No. 2, 2016.

Situngkir, R. 2021, “*Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, Jurnal Kajian Hukum IURIS STUDIA Vol . 2, No.3, Oktober 2021.

Yalid Yalid, Birman Simamora, 2022, “*Penerapan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan*” Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham). Vol 2 No 1, 1-13, 2022



C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

